

DAFTAR REFERENSI

A. BUKU

- Ardiansyah. *Hukum Administrasi Negara: Fenomena Hukum di Ruang Publik*. Makassar: Sah Media, 2022.
- Arikunto, S. *Penelitian Tindakan Kelas: Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Asshiddiqie, J. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Candra, M. *Birokrasi dan Good Governance*. Jakarta: Prenada Media, 2024.
- Fakhrudin, R. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Madani: Kelompok Intrans Publishing, 2020.
- Gunardi. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: STIH IBLAM, 2022.
- Hamja, B., Eltris, T. A., & Ibrahim. *Pengantar Ilmu Hukum: Konsep, Sejarah, Sumber dan Asas*. Jambi: Tren Digital Publishing, 2026.
- Huda, N. *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Jaidun. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Madza Media, 2023.
- Laritmas, S., & Rosidi, A. *Teori-Teori Negara Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2024.
- Lismawati, I. N. *Tinjauan Hukum Kedudukan Pejabat Badan Usaha Milik Negara Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2025.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Matitaputty, M. I., Salmon, H. C. J., Soplanit, M., Ramadhani, W., Monteiro, J. M., & Pattipawae, D. R. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Penerbit Widina, 2024.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Mulkan, H., & Aprita, S. *Hukum Otonomi Daerah*. Palembang: NoerFikri Offset, 2023.
- Munaf, Y. *Hukum Administrasi Negara: Sejarah Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2023.
- Mustamu, J. *Diskresi Dalam Pemerintahan: Hak, Batas dan Konsekuensi Hukumnya*. Bandung: Penerbit Widina, 2025.
- Nugraha, S. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (PPHN) Bidang Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2006.
- Nur, S. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. Makassar: Penerbit Carabaca, 2021.
- Ramadhany, M. I. *Ilmu Perundang-Undangan: Gesetzgebungsverfahren, Gesetzgebungsmethode Dan Gesetzgebungstechnik*. Yogyakarta: Deepublish, 2025.
- Saryono. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2018.
- Seldadyo, H. *Desentralisasi Dan Provinsi Ke Arah Penguatan Tatakelola Provinsi*. Jakarta: LIPI Press, 2024.
- Silalahi, S. A. F., & Sudarwati, Y. *Pembangunan Daerah Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Maluku Utara*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Soge, M. M. *Ilmu Perundang-Undangan: Teori, Asas dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2025.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif)*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum*. Kediri: UNP Kediri Press, 2022.
- Tjoman, A. A. L. *Norma Hukum Transplantasi Jantung (Vol. 1)*. Surabaya: Kaya Ilmu Bermanfaat, 2022.
- Wada, F. H., Pertiwi, Y. F., Hasiolan, A. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Jambi: CV Science Techno Direct, 2024.

Wardiono, K., Isman, Rochman, S., & Yuspin, W. *Ilmu Hukum Profetik: Perspektif Filsafat Ilmu*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2023.

Yulikhsan, E. *Keputusan Diskresi Dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi Dalam PTUN)*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

B. JURNAL

Alaydrus, A. S., Hasudungan, E. H., & Jati, P., "Analisis Pengaruh Tanggung Jawab Pekerjaan Dan Delegasi Wewenang Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Tugas Personil Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya", Jakarta : *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi*, 2025.

Amirillis, P., "Dampak Ketiadaan Perda Penetapan UKL/UPL Pada Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Di Bidang Lingkungan Hidup", Depok : *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2023.

Aritonang, R., "Algoritma Dalam Praktik Penemuan Hukum Modern", Bandar Lampung : *Veritas et Justitia*, 2024.

Ashfiya, D. G., "Diskursus Pergeseran Konsep Diskresi Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dan Pengujiannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara", Jakarta : *Jurnal Hukum Peratun*, 2023.

Bakti Setiawan, D., "Efektivitas Penyelenggaraan Dekonsentrasi Sebagai Wewenang Gubernur Dalam Kedudukan Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah", Padang : *UNES Law Review*, 2022.

Bebi Annisa, Nazila, F., Fazlim, M. R., Khairi, E. S., & Siregar, F. A., "Kajian Kritis Atas Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Penegakan Keputusan Administratif", Medan : *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2025.

Bela, P. W. N., & Chandra, A. E., "Kebijakan Kedudukan Staf Khusus Dalam Kegiatan Administrasi Pemerintahan Di Indonesia", Bandar Lampung : *Journal of Judicial Review*, 2020.

Dachi, C. S. R. P., Humaira, D. N., Dalimunthe, D. O. P., Putri, S. A. P. Y., & Marsal, I., "Analisis Kedudukan Pancasila Sebagai Grundnorm Dalam Hierarki Norma Hukum", Jakarta : *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2025.

Eka Mulya Dharma, A., "Analisis Yuridis Normatif Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah Otonom Dan Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia", Padang : *Ekasakti Jurnal Penelitian &*

Pengabdian, 2022.

Fadlly, Ramadhan, M. Z., & Nur, F., "Konsistensi Keberadaan Asas *Lex Specialis De Rogat Lex Generalis* Dalam KUHP Nasional", Gorontalo : *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2026.

Fanggi, P. A. L., "Analisis Konseptual Stufenbau Theory Terhadap Tata Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia", Kupang : *Jurnal Rekomendasi Hukum*, 2025.

Fiqri, I. N., & Frinaldi, A., "Integrasi Prinsip Hukum Administrasi Negara Dalam Transformasi Digital Governance Untuk Pelayanan Publik Akuntabel Dan Transparan", Padang : *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2025.

Fitri Salsabila, A., Taher, M. A., & Irham, M. S. A. F., "Penerapan Prinsip Legalitas, Yuridikitas, Dan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia Guna Mengukuhkan Tata Kelola Yang Berkeadilan", Tasikmalaya : *Jurnal Didaktik: Ilmiah PGSD FKIP*, 2023.

Hartono, Y., "Urgensi Lembaga Non Struktural Dalam Mewujudkan Good Governance", Cimahi : *Jurnal Kewarganegaraan*, 2023.

Hutagalung, S. N., & Mayasari, I., "Menakar Urgensi Pembentukan Delivery Unit/Tim Percepatan Pembangunan (Studi Kasus: Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Jakarta)", Blitar : *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 2023.

Noviyanti, W., Humaydiy, A. A., & Duriyat, M., "The Role of Bureaucracy in the Implementation of Education Policy", Tangerang : *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 2025.

Nugraha, H. S., "Peran Staf Ahli Dalam Pelaksanaan Tugas Bupati Muaro Jambi: Kebijakan Dan Strategi Optimalisasi", Jambi : *Datin Law Jurnal*, 2023.

Phinesia, E. L., "Penerapan Asas Praduga Keabsahan (*Vermoeden Van Rechtmatigheid Preasumptio Iustae Causa*) Dalam Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Di Pengadilan Tata Usaha Negara", Medan : *Jurnal Darma Agung*, 2024.

Pratama, S. M., & Pambudhi, H. D., "Kedudukan, Fungsi, Dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah Dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah", Yogyakarta : *Jurnal Analisis Hukum*, 2021.

Prianto, W., "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky", Mataram : *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2024.

- Putri Rizkyta, A., & Ningsih, B. R., "Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi", Jakarta : *Esensi Hukum*, 2022.
- Putri, S. A., Triono, A., & Kasmawati., "Diskresi Pejabat Administrasi Dalam Pelayanan Publik Terhadap Batasan Dan Pengawasan Diskresi", Bandar Lampung : *Jurnal Ilmu Hukum*, 2025.
- Ramadha Yanti Parinduri, Tampubolon, K., Pin, P., Sibuea, N., & Undang, G., "From Welfare State to Power State: Public Policy Transformation Under the Shadow of Oligarchy and Shadow Government in Indonesia", Bandung : *Khazanah Sosial*, 2025.
- Ramdani, D., "Deklinasi Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah Dan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Daerah Provinsi", Semarang : *Jurnal Restorasi Hukum*, 2022.
- Rinaldi, S. F. P., Anggrainy, L. M., Malva, C. L., Sari, T. D., & Pratama, M. A., "Hukum Positivisme: Analisis Pemikiran Hans Kelsen Tentang Grundnorm", Cirebon : Nusantara: *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 2025.
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I., "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)", Kediri : *Journal Law and Government*, 2024.
- Roziqin, Syahrizal, & Koyansow, R. T., "Sistem Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", Surabaya : *Journal de Facto*, 2024.
- Vivi Nilasari, Frinaldi, A., & Roberia., "Hukum Administrasi Negara Dan Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia", Padang : *UNP Press*, 2025.
- Widya Hartati, Wijaya, S. A., & Bahri, S. Y., "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Administrasi Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara", Jakarta : *Parleментар: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, 2024.
- Yusdheaputra, W., "Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan", Surabaya : *Jurist-Diction*, 2023.

C. SKRIPSI & TESIS

- Amini, A. Efektivitas Fungsi Tim Bupati Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah (TBUP3D) Kabupaten Majene Dalam Perencanaan

Pembangunan Daerah (Skripsi), 2024.

Awang, J. S. U. L. Tinjauan Yuridis Pengaturan Kembali Norma Yang Dinyatakan Inkonstitusional Dalam Undang-Undang. (Tesis). Makassar: Universitas Hasanuddin, 2024.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026.

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengangkatan Tim Khusus Gubernur dalam Pengendalian Pencapaian Target Pembangunan Daerah.

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tim Khusus Gubernur Dalam Pengendalian Pencapaian Target Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

E. INTERNET & BERITA

Bachtiar. "*Polemik Staf Khusus Kepala Daerah: Kekosongan Hukum Atau Diskresi Yang Dibatasi?*". JDIIH Tangerang Selatan.

Batamtimes.co. (2025). "*Gubernur Kepri Ansar Ahmad Bentuk Tim Khusus, Libatkan 17 Anggota Ini Namanya*". Batam Times.

MabesNews.com. (2025). "*Pembentukan Tim Khusus Gubernur Kepri Disorot: Diduga Tak Berdasar Hukum Dan Memboroskan APBD*". Mabes News.

Regional News. (2023). "*BPK Temukan Belasan Miliar Honorarium Timsus Gubernur Kepri Tak Disertai Bukti Kerja*". Regional News.